

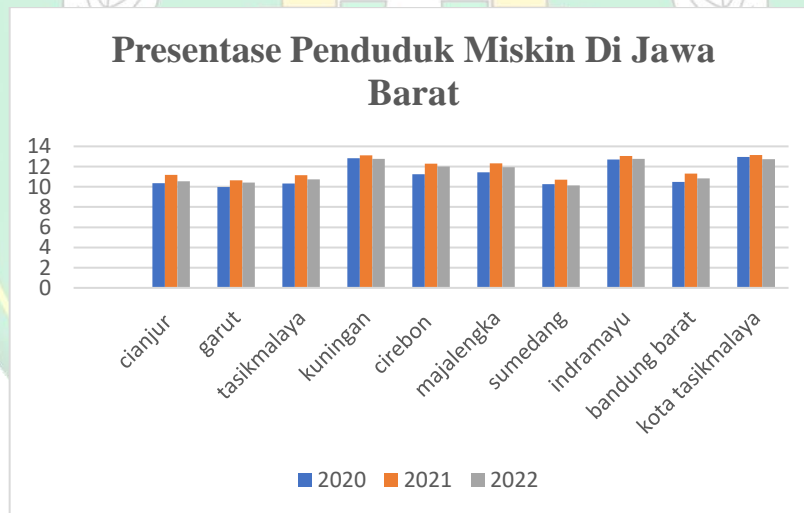
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanggulangan kemiskinan memiliki urgensi yang besar karena berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, kualitas hidup individu dan masyarakat dapat mengalami perubahan yang baik. Penanggulangan kemiskinan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, Penanggulangan kemiskinan ini merupakan bagian dari upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mencapai tujuan yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah (Murdiyana, 2017).

Grafik 1.1: Presentase Penduduk Miskin Di Jawa Barat 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Tabel diatas merupakan tabel presentase 10 daerah termiskin di Jawa Barat pada tahun 2020-2023. Diantara 10 daerah tersebut Kabupaten Cirebon menjadi salah satunya dengan presentase pada tahun 2020 11,24% , tahun 2021 sebesar 12.30% dan pada 2022 sebesar 12.01%. meskipun dari tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan, kemiskinan tetap menjadi permasalahan serius yang harus tangani. Kemiskinan ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor

seperti kurangnya pendidikan, kesehatan yang buruk, tingkat pengangguran yang tinggi dan yang lainnya (Badan Pusat Statistik,2022).

Kemunculan kemiskinan tentu memiliki keterkaitan erat dengan peran pemerintah dan rencana kerjanya dalam menanggulangi serta mengentaskan masalah tersebut. Dalam kerangka ini, sebuah Peraturan Presiden (Perpres) dengan nomor 15 tahun 2015 telah merinci rencana percepatan penanggulangan kemiskinan yang terorganisir dalam tiga klaster. Salah satu klaster yang terdapat dalam perpres ini, yaitu klaster pertama, menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial berbasis keluarga. Contoh dari program-program ini mencakup jamkesmas, PKH, RASKIN, KIS hingga Bantuan Siswa Miskin (BSM) (Azhari dan Dadang, 2022).

Dari beberapa program penanggulangan kemiskinan, peneliti mengambil dua program yaitu BPNT dan PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dianggap dapat menanggulangi kemiskinan karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin secara langsung. PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang memberikan akses ke pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. BPNT merupakan program bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada keluarga yang memiliki kondisi ekonomi termasuk 25% perekonomian terendah di wilayahnya (Handoko, 2022).

Menurut Menteri Sosial RI Agus Gumiwan Kartasasmita PKH menjadi program prioritas nasional karena mempunyai dampak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Yakni dengan meningkatkan daya beli masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan sosial non tunai yang diberikan. PKH dan BPNT merupakan program bantuan sosial yang efektif dalam menurunkan kemiskinan, Dan selain itu PKH dan BPNT ini memiliki komplementaritas yang lebih dibandingkan program klaster pertama lainnya. Program ini memberikan bantuan komplementaritas lainnya, seperti Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Bantuan Kartu

Indonesia Sehat (KIS), yang dapat membantu mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan (aneftasari, 2021).

Menurut badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.315.417 yang di dalamnya ada dua jenis kelamin yaitu perempuan sebanyak 1.141.546 jiwa dan untuk laki-laki 1.173.871 jiwa dengan luas wilayah 1.077 km² yang terdiri dari 40 kecamatan. Salah satu kecamatan yang berada di kabupaten cirebon yaitu kecamatan sumber, kecamatan sumber ini menjadi pusat pemerintahan fasilitas publik dan sekaligus sebagai ibukota kabupaten cirebon, walaupun menjadi pusat, kecamatan sumber ini memiliki jumlah penerima bantuan yang tercatat di DTKS yaitu dengan jumlah individunya sebanyak 51.443 jiwa dan jumlah keluarga atas jumlah individu sebanyak 20.956. berikut jumlah penerima Bantuan PKH dan BPNT di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (Badan Pusat Statistik,2022).

Tabel 1.1: Jumlah Penerima PKH di kecamatan Sumber

| No | Kelurahan/Desa | Januari | Desember |
|----|----------------|---------|----------|
| 1 | Babakan | 152 | 143 |
| 2 | Gegunung | 299 | 332 |
| 3 | Kaliwadas | 306 | 618 |
| 4 | Kemantren | 214 | 475 |
| 5 | Kenanga | 133 | 394 |
| 6 | Matangaji | 192 | 315 |
| 7 | Pasalakan | 430 | 422 |
| 8 | Pejambon | 228 | 219 |
| 9 | Perbutulan | 161 | 156 |
| 10 | Sendang | 169 | 158 |
| 11 | Sidawangi | 197 | 207 |
| 12 | Sumber | 335 | 312 |
| 13 | Tukmudal | 237 | 221 |

| | | | |
|----|-----------|-----|-----|
| 14 | Watubelah | 340 | 322 |
|----|-----------|-----|-----|

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Tabel 1.2: Jumlah Penerima Bantuan BPNT Di Kecamatan Sumber

| NO | Kelurahan/Desa | januari | desember |
|----|----------------|---------|----------|
| 1 | Babakan | 362 | 337 |
| 2 | Gegunung | 572 | 563 |
| 3 | Kaliwadas | 618 | 594 |
| 4 | Kemantren | 475 | 447 |
| 5 | Kenanga | 394 | 396 |
| 6 | Matangaji | 458 | 449 |
| 7 | Pasalakan | 890 | 846 |
| 8 | Pejambon | 458 | 520 |
| 9 | Perbutulan | 551 | 525 |
| 10 | Sendang | 394 | 381 |
| 11 | Sidawangi | 442 | 450 |
| 12 | Sumber | 717 | 687 |
| 13 | Tukmudal | 470 | 449 |
| 14 | Watubelah | 582 | 563 |

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

Dari kedua tabel jumlah penerima PKH dan BPNT periode Januari dan Desember tahun 2023, jumlah penerima kedua bantuan tersebut mengalami penurunan, hal ini menjadi bukti bahwa PKH dan BPNT mengurangi kemiskinan di berbagai kelurahan di kecamatan sumber. Hal diperkuat oleh pernyataan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Beliau menyatakan bahwa Program PKH dan BPNT telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Dan sebagai bukti lembaga microsava memaparkan bahwa BPNT membantu 12-19% total pengeluaran makanan rumah tangga per bulan (atau 10–14 hari kebutuhan pangan) dan BPNT memberikan peluang bagi pengusaha mikro, terutama perempuan sebesar 68% termasuk e-Warong KUBE dan BPNT

memberdayakan dan menempatkan perempuan sebagai fokus utama (Zulfikar, 2023).

PKH juga berdampak positif untuk kesehatan dan pendidikan. Yakni peningkatan konsumsi income per kapita 10%, peningkatan konsumsi makanan berprotein 8%, mengurangi stunting 23--27 persen, 56--62 persen mengurangi stunting berat, meningkatkan kehadiran di sekolah hingga 95% (Rahmawati, 2022).

Dan pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa sumber. Contohnya, penelitian yang dilakukan di Kabupaten Minahasa Tenggara mencatat bahwa PKH berpengaruh positif terhadap kemiskinan, meskipun tidak signifikan statistik. Sementara itu, penelitian yang dilakukan di Kota Bitung mencatat bahwa PKH dan BPNT berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan Penelitian lainnya yang dilakukan di Desa Pucangsimo di Kabupaten Jombang mencatat bahwa BPNT memiliki pengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan (Gultom, 2020).

Penelitian ini mendukung teori bahwa bantuan sosial dan program pengeluaran rumah tangga yang terstruktur dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, termasuk pengurangan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan program BPNT dan PKH dalam mengurangi beban pangan dan mengoptimalkan konsumsi pangan dan non pangan rumah tangga.

Dan dari tabel diatas dapat dilihat juga penerima bantuan yang paling sedikit adalah kelurahan kanaga dengan penerima bantuannya hanya sebanyak 529 sedangkan kelurahan yang paling banyak penerima bantuannya yaitu kelurahan pasalakan yang penerima bantuannya sebanyak 1.228 ribu keluarga. Jumlah tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, oleh karena itu berikut jumlah penduduk per kelurahan.

Tabel 1.3: Jumlah Penduduk Di Kecamatan Sumber

| No. | Kelurahan/Desa | Penduduk (Orang) | Jumlah Keluarga | Rata-rata anggota keluarga |
|-----|----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 | Kaliwadas | 8.388 | 2.567 | 3,27 |
| 3 | Sendang | 4.263 | 1.352 | 3,15 |
| 4 | Sidawangi | 5.910 | 1.893 | 3,12 |
| 5 | Perbutulan | 4.308 | 1.243 | 3,47 |
| 5 | Matangaji | 4.397 | 1.483 | 2,96 |
| 6 | Kemantren | 4.699 | 1.445 | 3,25 |
| 7 | Gegunung | 4.830 | 1.434 | 3,37 |
| 8 | Pejambon | 4.434 | 1.373 | 3,23 |
| 9 | Kenanga | 7.942 | 2.545 | 3,12 |
| 10 | Sumber | 9.597 | 3.075 | 3,12 |
| 11 | Tukmudal | 12.776 | 3.966 | 3,22 |
| 12 | Watubelah | 7.231 | 2.236 | 3,23 |
| 13 | Pasalakan | 8.169 | 2.530 | 3,23 |
| 14 | Babakan | 3.947 | 1.190 | 3,32 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Cirebon

Berdasarkan tabel diatas, Jumlah penduduk yang paling banyak itu Kelurahan Tukmudal yaitu jumlah penduduknya sebanyak 12.776 dengan jumlah keluarga 3.966 dan untuk kelurahan pasalakan sendiri itu sebanyak 8.169 penduduk dengan jumlah keluarganya 2.530. kelurahan Pasalakan merupakan Jumlah Penerima Bantuan PKH dan BPNT paling banyak paling banyak yaitu 1.228 keluarga atau sekitar 50% dari jumlah keluarga yang ada di kelurahan pasalakan artinya banyaknya jumlah penerima bantuan tersebut memang benar banyak orang yang perlu dibantu pada kelurahan tersebut.

Banyaknya jumlah penerima bantuan dapat berpengaruh pada proses penanggulangan kemiskinan dan hal ini dipengaruhi oleh beberapa masalah seperti penyaluran bantuan yang kurang tepat, dari jumlah penerima tersebut dikhawatirkan bukan yang pantas mendapatkan bantuan tersebut sehingga

menyebabkan banyaknya angka penerima bantuan itu dan juga dapat disebabkan tidak *update* data, KPM yang sudah sejahtera masih tetap mendapatkan bantuan, atau orang yang sudah meninggal masih tetap menerima bantuan. Jadi penulis menduga banyaknya jumlah penerima bantuan di Kelurahan Pasalakan dipengaruhi oleh masalah masalah diatas.

Adanya kedua bantuan tersebut beserta bantuan lainnya itu merupakan program yang dirancang tidak untuk mencabut akar kemiskinan melainkan mengurangi kerentanan, kesengsaraan serta menanggulangi kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas (Khotim dan Nazila, 2023). Untuk itu pada penelitian ini Penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Kelurahan Pasalakan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Pasalakan kecamatan Sumber ?
2. Apakah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Pasalakan kecamatan Sumber ?
3. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Pasalakan kecamatan Sumber?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Pasalakan kecamatan Sumber.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Pasalakan kecamatan Sumber.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Pasalakan kecamatan Sumber.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan para pembaca penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini akan menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam maka dijadikan sebagai pengalaman dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru serta bertambahnya wawasan tentang bidang ini.

- b. Bagi Lembaga Terkait

Penelitian ini dapat menjadi bahan tolak ukur lembaga terkait tentang berhasil atau tidaknya sebuah program yang mereka jalankan dan dijadikan bahan evaluasi tepat atau tidaknya.

- c. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam mengatasi kemiskinan.